

ABSTRAK

Dengan makin berkembangnya era globalisasi pembangunan nasional terutama di bidang ekonomi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa. Salah satunya ialah jasa pengangkutan. Jasa pengangkutan saat ini sangat dibutuhkan karena semakin besarnya kebutuhan masyarakat. Namun pelaksanaan jasa pengangkutan barang ini tidak jauh dari suatu resiko yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Posisi konsumen sebagai pengguna jasa tersebut sangatlah lemah jika terjadi suatu kerugian yang diakibatkan oleh kelalaiannya yang dilakukan oleh pengemudi perusahaan pengangkutan barang dikarenakan juga adanya klausula baku yang dibuat oleh perusahaan pengangkutan barang. Undang-undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen yang dapat dirugikan dengan berlakunya klausula baku tersebut. Permasalahan terjadi ketika pelaku usaha melakukan pembatasan tanggung jawab atau tidak mau bertanggung jawab, maka dengan UUPK konsumen mendapat perlindungan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan pengangkutan terhadap kerugian yang di derita konsumen karena kelalaian pengemudi perusahaan pengangkutan barang dan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pihak yang telah dirugikan.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, serta wawancara kepada aparat yang berwenang. Metode analisis data yang adalah metode analisis yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1367 KUHPerdara dan hubungannya dengan konsep product liability, bahwa perusahaan harus bertanggung jawab dikarenakan dalam proses melakukan jasanya terjadi suatu kecacatan jasa yang dilakukan oleh pengemudi perusahaan pengangkutan barang yang merupakan dibawah penguasaan perusahaan tersebut. Selain itu pembatasan tanggung jawab bertentangan dengan Pasal 18 huruf a UUPK. Kedua dalam hal bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terdapat dalam Pasal 19 UUPK dimana bentuk tanggung jawab kerugian harus sesuai dengan harga barang yg sebelumnya. Maka perjanjian baku yang dibuat oleh PT. TiKi seharusnya sesuai dengan UUPK dan tidak boleh bertentangan dengan hanya melakukan ganti kerugian sebesar 10x biaya pengiriman.

ABSTRACT

With the growth of the globalisation era the national development especially in the economic sector that has to provide the support of the business sector to produce many kinds of service and production sectors. One of the service sectors that also grows is the express service or we also know as the parcel service. This kind of parcel service is one of the most needed services by the society because of the need itself. But unfortunately in the practice of this service is still far from ideal and still very risky especially for the consumer. The position of the consumer as the user of the parcel service is very unprotected especially when an accident occurs that is caused by the driver of the parcel service company and also because of the contract that is made by the parcel service to bind the customer. The Consumer Protection Act has provided enough protection for the consumer when a loss occurs because of the contract that is made by one party only, in this case the parcel service company. The problems occur when the business actor in this case the parcel service company issued a delimitation of a responsibility or in the worst case scenario has become irresponsible, through this act the consumer has been provided a legal protection by the government through this act. The purpose of this research is to find out how far the responsibility of the parcel service company when a financial loss or other kind of loss that is caused by the actions of a driver of the parcel company occurs.

The research method that is used by the writer is the specification of analytical descriptive with the approach of normative juridical, through the use of secondary data such as legal primary material, legal secondary material, and tertiary legal material. Data gathering technique that is used by the writer is through library study, interview to the authorized personnel. The data analytic method that is used by the writer is qualitative juridical analytic.

According to the research result, a conclusion occurs that as already written in The Private Law Act Codification Art. 1367 and the correlation with the product liability, that the parcel service company should be responsible because in the process to provide service to consumer when an accident occurs by the driver of the parcel company. Also the contract that is made by one party only in this case the parcel company according to the Art. 19 of The Consumer Protection Act where the form of responsibility has been delimited by the parcel company a violation to the Act itself.